

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**



Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat : Jalan Melati Nomor 14 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21094

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun 2019, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Perikanan selama 1 tahun. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Demikain laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kandangan, Januari 2020

**Kepala Dinas,**



**I. H. SAIDINOOR**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641215 199312 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .....	2
1.3. Isu Strategis .....	4
1.4. Landasan Hukum .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Perencanaan Strategis .....	7
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	10
2.3. Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2. Pengukuran .....	19
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023.....	9
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	10
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2019.....	12
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	16
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	17
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	18
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	19
Tabel 3.2. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran.....	20
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sekretariat Tahun 2019 .....	21
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2019 .....	27
Tabel 3.5. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	29
Tabel 3.6 Perkembangan Kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya .....	30
Tabel 3.7 Data produksi benih ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	30
Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2019.....	31
Tabel 3.9. Data Produksi Perikanan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019.....	33
Tabel 3.10. Daftar Penerima Barang Hibah Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK) .....	34
Tabel 3.11. Daftar Penerima Barang Hibah Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK) .....	34

Tabel 3.12. Data Produksi Perikanan Prov. Kalimantan Selatan...	34
Tabel 3.13. Data Produksi Perikanan Nasional .....	35
Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Tahun 2019 .....	36
Tabel 3.15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perikanan .....	38



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perikanan sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perikanan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



## 1.2. Tugas dan Fungsi SKPD

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dinas Perikanan Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Tangkap;
5. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

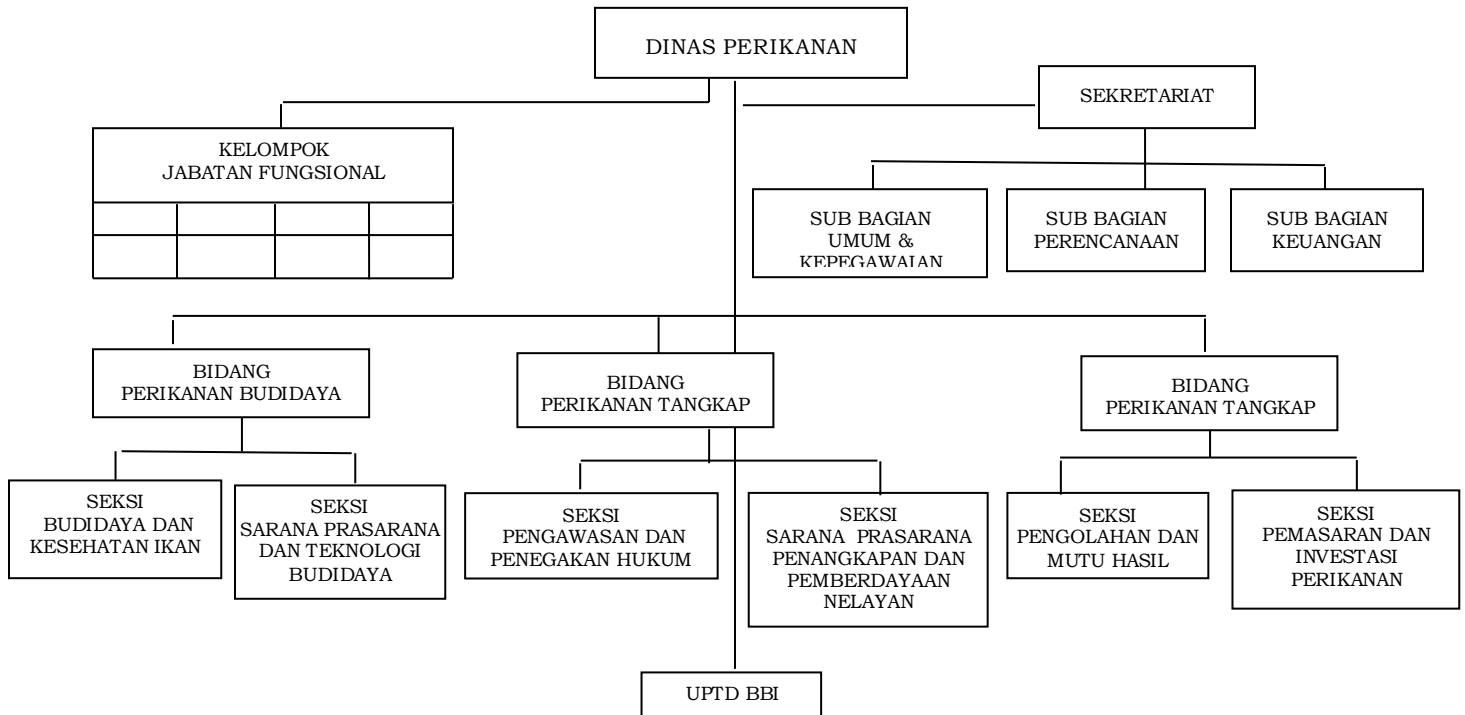
Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) UPTD.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kab. HSS terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya
  - Seksi Budidaya dan Kesehatan Ikan;
  - Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap
  - Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
  - Seksi Sarana Prasarana Penangkapan dan Pemberdayaan Nelayan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
  - Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan
  - Seksi Pemasaran dan Investasi Perikanan
6. UPTD Lingkup Dinas
  - UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan

### 1.3. Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat.

Berdasarkan data statistik tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 235.217 jiwa, sementara jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 9.056,43 ton dan jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 4.572,79 ton. Potensi pengembangan budidaya air tawar dengan luasan 7.215,044 Hektar dan potensi penangkapan ikan yang sangat besar dengan luasan perairan umum sebesar 80.790 Hektar.

2. Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja belum optimal

Dari data kepegawaian di Dinas Perikanan, masih terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan fungsional umum. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas Dinas.



#### 1.4. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang didalam perencanaan strategis tersebut terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

#### 1). Tujuan dan sasaran

##### a. Tujuan

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB

##### b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB

#### 2). Strategi dan Kebijakan

##### a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif.



b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah dan disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)	
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	20,67	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Nilai/Predikat AKIP	89,02 (A)		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	80,55(A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)	
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	9,07	Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	4,29	5,46	6,56	8,64	8,9	9,07	9,07	



## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, IKU Dinas Perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	Sekretariat	Semua Bidang
		Predikat/Nilai AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, Pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%			
2	Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Dihitung berdasarkan jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun N - jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) dibagi jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) dikali 100% bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan	$\frac{\sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB tahun N} - \sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB Tahun (N-1)}} \times 100\%$	Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap	BPS Kab. HSS

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.



Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja tahun 2019. Kepala Dinas Perikanan (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan, demikian juga halnya dengan para pejabat struktural eselon III (Pejabat Administrator) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Kepala Dinas Perikanan. Sedangkan untuk pejabat struktural eselon IV (Pejabat Pengawas) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan atasannya masing-masing.

Untuk para Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat dengan Sekretaris dan untuk Kepala Sub Bidang dengan Kepala Bidang nya masing-masing.

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan sebagai berikut :





Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	-	-	-	23,50	961.043.845
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	81,89 (A)	-	-	-	81,89 (A)	961.043.845
		1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	578,833,000
		1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	39.680.350
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	32.820.000
		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	14.000.000
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	24.975.000
		5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	156.750.000
		6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	310.607.650



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	284.376.745
		1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	87.320.745
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	93.656.000
		3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	103.400.000
		3). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100	%					9.750.000
		1. Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi kualitas	12	laporan	-	3	-	9	4.875.000
		2. Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	laporan	3	3	3	6	4.875.000
		4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	88.084.100
		1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	Tahun	1	-	0,5	0,5	-	88.084.100
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatkannya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	2.419.600.600
		1). Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.791	1.197,75	1.101,93	1.149,84	1.341,48	775.780.000



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah bibit ikan	ekor	650.000	210.500	180.000	84.500	175.000	103.150.000
		2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Jumlah luasan budidaya	Ha	0,12	-	0.8	0.4	-	178.295.000
		3. Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih ikan yang ditebar	Ekor	230.000	-	230,000.00	-	-	335.200.000
		4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	Sampel	3	1	1	-	1	14.625.000
		5. Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah petani pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi	Orang	90	30	30	30	-	25.860.000
		6. Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Jumlah benih yang ditebar	Ekor	10.000	-	10.000	-	-	118.650.000
		2). Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	9.579	2,107.38	2,490.54	2,586,33	2,395	1.599.369.000
		1. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	Orang	150	-	150	-	-	19.854.000
		2. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	338.690.000
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang representatif & Jumlah alat tangkap yang representatif	Unit	15 & 600	-	15 & 600	-	-	253.850.000
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah kapal yang layak operasi	Unit	55	-	-	55	-	986.975.000
		3). Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	%	3	-	3	-	-	27.900.000



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menggunakan teknologi hasil perikanan	Orang	9	-	9	-	-	8.250.000
		2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan	Kali	1					7.750.000
		3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pemasaran hasil perikanan yang tersedia	Unit	2					11.900.000
		4). Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	1	-	0,5	0,5	-	16.551.600
		1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang memiliki kompetensi	Orang	70	-	35	35	-	16.551.600



Pada tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Kegiatan di Sekretariat merupakan penjabaran dari Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023, dimana indikator tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang memiliki target sebesar 23,50. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan salah satu indikator Sasarannya berupa Nilai/Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 4 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
				I	II	III	IV				
1		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	%	100	100	100	100	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	Rp 4,875,000	
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	-	-	-	81,89		Penyusunan Dokumen AKIP	Rp 4,875,000	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Rp 39,680,350	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp 32,820,000	
								Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	Rp 14,000,000		
								Penyediaan makanan dan minuman	Rp 24,975,000		
			%	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp 156,750,000
										Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Rp 310,607,650
									Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pereliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 87,320,745
									Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 93,656,000	
								Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 103,400,000		
									Rp 88,084,100		



Sementara untuk mencapai tujuan 2 pada Tabel 2.3 di atas yang memiliki keterkaitan dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Dinas Perikanan yang memiliki kewenangan urusan Kelautan dan Perikanan menetapkan Sasaran berupa meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor Perikanan.

Sasaran ini ditopang oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bidang Perikanan Budidaya</b>										
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.197,75	1.101,93	1.149,84	1.341,48	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan bibit ikan unggul	103.150.000
									Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000
									Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000
									Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000
									Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000
									Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	118.650.000
<b>Bidang Perikanan Tangkap</b>										
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	2.107,38	2.490,54	2.586,33	2.395	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	19.854.000
									Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	338.690.000
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	253.850.000
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	986.975.000

Sedang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan pendukung pencapaian tujuan 2 ini, dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				I	II	III	IV			
1	Meningkatnya persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang aktif	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang aktif	%	-	3	-	-	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8,250,000
									Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7,750,000
									Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11,900,000
2	Meningkatnya persentase kapasitas petani ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	-	0,5	0,5	-	Peningkatan Kesejahteraan Petani ikan	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	16,551,600



### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2019.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4			5		6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	20,67	23,50	20,67	-	100	-
	Predikat/Nilai AKIP	Predikat/ Nilai AKIP	80,55 (A)	82,55 (A)	80,55 (A)	-	100	-
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	4,29	5,46	7,13	8,42	166,20	154,21





### 3.2 Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun hasil perhitungan pengukuran indikator kinerja sasaran tahun 2019 ini sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERHITUNGAN INDIKATOR	FORMULASI
1	2	3	4
1	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>Hasil evaluasi internal dari Inspektorat</b>	-
	Nilai/Predikat AKIP		-
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	(Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun N – Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1)/Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) x 100 %	$\frac{(218.350.890.000 - 201.401.860.000)}{201.401.860.000} \times 100 \%$

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut :



Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sekretariat Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGLATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	-	-	-	23,50	-	-	-	-	-	961.043.845	832,934,643	86,67
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	81,89 (A)	-	-	-	81,89 (A)	-	-	-	-	-	961.043.845	832,934,643	86,67
		1). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah												9,750,000	9,750,000	100
		1. Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi kualitas	12	laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	100	4.875.000,00	4,875,000	100
		2. Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	laporan	6	3	3	4	6	3	3	3	100	4.875.000,00	4,875,000	100
		2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	578,833,000	492,904,773	85.15
		1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	39,680,350	38,652,350	97.41
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	32,820,000	26,239,753	79.95
		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	14,000,000	14,000,000	100
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	24,975,000	22,175,000	88.79



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	156,750,000	128,500,000	81.98
		6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	310,607,650	263,337,670	84.78
		3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	284,376,745	249,082,270	87.59
		1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	87,320.745	86,868,990	99.48
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	93,656,000	65,787,280	70.24
		3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	103.400.000	96.426,000	93.26
		4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88,084,100	81,197,600	92.18
		1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	Tahun	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	88,084,100	81,197,600	92.18

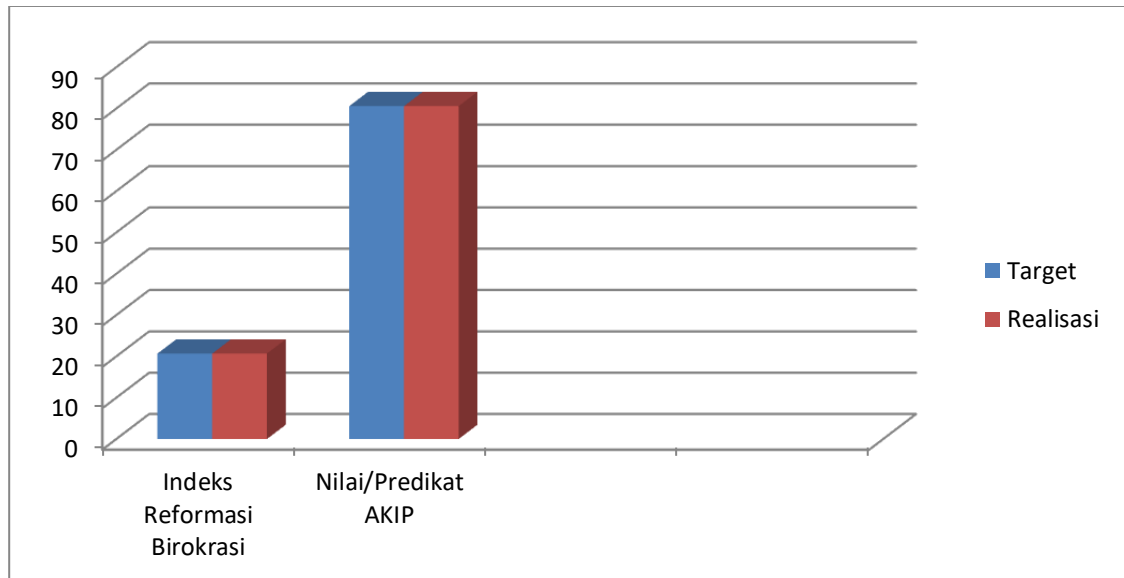


Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 realisasi yang ada belum bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena hasil penilaian evaluasi AKIP belum dilaksanakan. Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 10 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian masih belum bisa diukur untuk tahun 2019 karena belum dilakukan penilaian. Namun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 diperoleh nilai sebesar 20,67. Dinas Perikanan tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian yang ditarget pada triwulan IV masih belum ada nilainya. Penilaian yang diukur berdasarkan hasil evaluasi Laporan AKIP oleh Inspektorat. Sementara nilai AKIP tahun 2018 diperoleh nilai sebesar 80,55 atau kategori A.

Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai/predikat AKIP tahun 2018 tersaji dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1



Pelaksanaan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan ini melalui beberapa tahapan yakni :

- Manajemen Perubahan, berupa pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (SK Kepala Dinas Perikanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan RB, SK Kepala Dinas Perikanan No. 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan RB di Lingkungan Dinas Perikanan, penyusunan rencana kerja/roadmap RB, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RB, pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kinerja organisasi (melibatkan pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan RB, pembentukan agent of change).
- Penataan PerUndang-Undangan. Dinas Perikanan sebagai pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan melaksanakan Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan potas. Dinas Perikanan belum melaksanakan revisi Perda dalam melakukan pengawasan perikanan tangkap di Hulu Sungai Selatan.
- Penataan dan Penguatan Organisasi, berupa pelaksanaan evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yg dihasilkan dan menyusun SOTK baru.



- Penataan Tata Laksana, berupa penyusunan SOP dan mengevaluasinya, melakukan pengembangan e-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, melaksanakan pengelolaan kearsipan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan.
- Penataan Sistem Manajemen SDM, berupa analisis jabatan dan beban kerja, menyusun kebutuhan pegawai, Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi, terlaksananya penetapan dan penerapan kinerja individu
- Penguatan Akuntabilitas, berupa komitmen keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, penyusunan PK, meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui asistensi.
- Penguatan Pengawasan diantaranya berupa penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyediaan media pengaduan masyarakat, terlaksananya pembangunan Zona Integritas.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, berupa terlaksananya Budaya Pelayanan Prima, terlaksananya pengelolaan pengaduan, terlaksananya penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 100% atau jumlah 27 dokumen dari target 27 dokumen pada tahun 2019, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama Dokumen	Jumlah	
1	Cascading Kinerja Tahun 2019	1	Dokumen
2	Renstra	1	Dokumen
3	Renja 2019 (Murni)	1	Dokumen
4	Perubahan Renja 2019	1	Dokumen
5	IKU + SK 2019	1	Dokumen
6	PK Murni 2019	1	Dokumen
7	PK Individu Murni 2019	1	Dokumen
8	PK Perubahan 2019	1	Dokumen
9	PK Individu Perubahan 2019	1	Dokumen
10	Rencana Aksi 2019	1	Dokumen
11	Capaian Kinerja Triwulan I, II dan III Tahun 2019	3	Dokumen
12	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1	Dokumen
13	Laporan Kinerja 2019	1	Dokumen
	Jumlah	15	Dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada tahun 2019 sebanyak 12 dokumen. Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

No	Nama Dokumen	Jumlah	
1	PRA RKA Murni	1	Dokumen
2	RKA Murni	1	Dokumen
3	RKA Perubahan	1	Dokumen
4	DPA Murni	1	Dokumen
5	DPA Perubahan	1	Dokumen
6	Laporan Keuangan Bulanan	1	Dokumen
6	Laporan Keuangan Triwulan	3	Dokumen
7	Laporan Prognosis Semesteran	2	Dokumen
8	Laporan Keuangan akhir tahun (CALK)	1	Dokumen
	Jumlah	12	Dokumen

Target indikator kinerja program tiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun.



Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	-	-	-	-	8,42	775,780,000	742,196,750	94.77
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.791	1.197,75	1.101,93	1.149,84	1.341,48	1.254,89	1.165,3	1.204,56	1.405,8	105	775,780,000	742,196,750	95.67
		1. Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah bibit ikan	ekor	650.000	210.500	180.000	84.500	175.000	210.500	180.000	84.500	177.700	100.41	103.150.000	101,142,500	98.05
		2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Jumlah luasan budidaya	Ha	0,12	-	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	-	100	178.295.000	173,823,000	97.49
		3. Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih ikan yang ditebar	Ekor	230.000	-	-	-	230,000	-	-	-	230,000	100	335.200.000	313,175,000	93.43
		4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	Sampel	3	1	1	-	1	-	-	-	3	100	14.625.000	14,595,000	99.79
		5. Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah petani pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi	Orang	90	30	30	30	-	-	-	-	90	100	25.860.000	24,161,250	93.43
		6. Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Jumlah benih ikan yang ditebar	Ekor	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	100	118,650,000	115,300,000	97.18





Tabel 3.4 di atas memiliki keterkaitan dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yakni meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor Perikanan yang merupakan Sasaran Strategis Dinas Perikanan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi yaitu Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan sampai dengan akhir tahun 2019 ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebesar 8,42 % dari target Tahun 2019 sebesar 5,46% (154,21) %. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 4,14 %, tahun 2017 sebesar 4,29 % dan tahun 2018 sebesar 7,13 %.

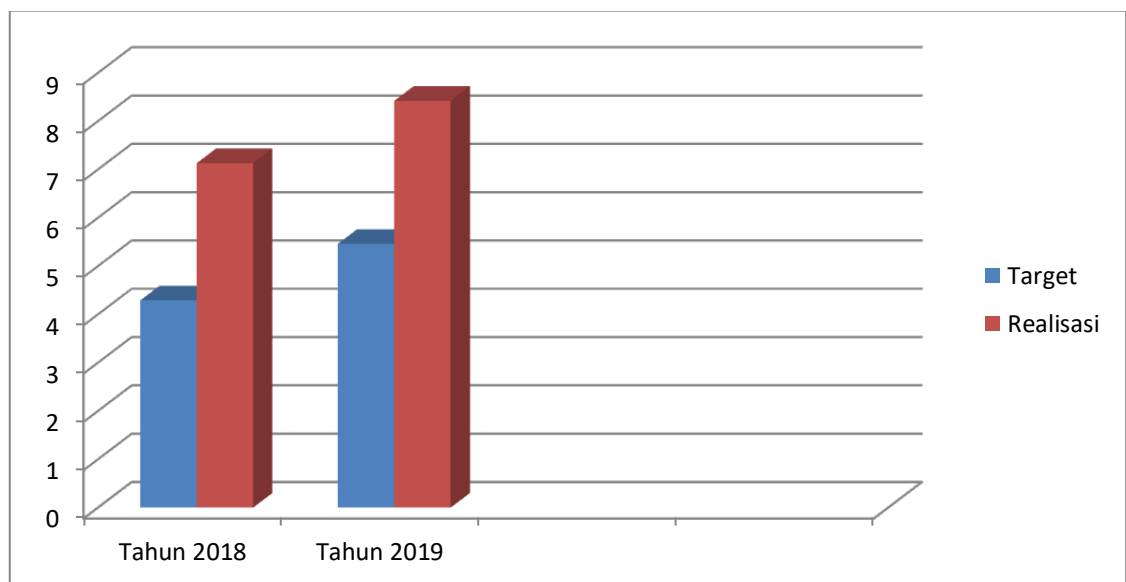
Tabel 3.5. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	-	4,14	
2017	-	4,29	
2018	4,29	7,13	166,20
2019	5,46	8,42	154,21

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kinerja persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan tahun 2018 dan tahun 2019 tersaji dalam tabel berikut ini :

Grafik 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2



Perhitungan persentase pertumbuhan PDRB ini berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya (data dari Dinas Perikanan) dan harga produksi perikanan yang diperoleh berdasarkan survei harga indeks produsen yang dilaksanakan BPS. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 dikarenakan banyaknya kegiatan produksi yang dilakukan pelaku perikanan dan banyaknya bantuan fasilitasi yang dananya berasal dari Pemerintah Daerah maupun dari Pusat (DAK) serta pihak ketiga (swasta).

Pada Tabel 3.4 diatas, Pencapaian Kinerja Perikanan Budidaya yang melakukan kegiatan urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi pada tahun 2019 diperoleh produksi perikanan budidaya sebesar 5,030.55 Ton dari target 4,791



Ton (105%). Produksi pada tahun ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 4,572.79 Ton.

Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Perkembangan Kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Pengembangan bibit ikan unggul	650.000 ekor	Benih ikan yang tersedia di BBI
2	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	0,12 Ha	1. Hapa/net tancap (Kel. Madani Kapuh), 2. Rehab Kolam Budidaya (Kel. Tani Makmur Durian Rabung, Kel. Sentosa Malilingin) 3. Kolam terpal bundar (Kel. Suka Jaya Malilingin)
3	Budidaya Ikan Air Tawar	230,000 ekor	Hibah benih dan pakan ikan
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	3 sampel	Pengujian dan pemeriksaan sampel pada ikan
5	Pelatihan Budidaya Perikanan	90 orang	Workshop teknis budidaya ikan, workshop budidaya ikan nila, workshop cara budidaya ikan yang baik

Tabel 3.7. Data produksi benih ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2018	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2020 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1	Nila	500.000	270.420	225.000	272.800	256.000
2	Lele	100.000	24.250	25.000	25.400	31.000
3	Mas	200.000	109.100	140.000	83.000	150.000
4	Patin	150.000	80.630	90.000	90.500	101.000
5	Papuyu	400.000	123.400	170.000	181.000	177.000
	Jumlah			650.000	652.700	



Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	-	-	8,42	0	0	1,632,369,000	1,537,806,000	94.21
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	9.579	2.107.38	2.490.54	2.586.33	2.395	2.287.70	2.630.63	2.706.31	2.433.31	105	1,632,369,000	1,537,806,000	94.21
		1. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	orang	150	-	-	150	-	-	-	100	50	100	19.854.000	18,654,000	93.96
		2. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	371,690,000	360,319,500	96.94
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang representatif & Jumlah alat tangkap yang representatif	Unit	15 & 600	-	15 & 600	-	-	-	-	0	15 & 600	100	253,850,000	238,670,000	94.02
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah kapal yang layak operasi	Unit	-	-	-	-	55	-	-	-	55	100	986,975,000	920,162,500	93.23



Pada Tabel 3.8 diatas, Pencapaian Kinerja Perikanan Tangkap yang melakukan kegiatan urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi pada tahun 2019 ini diperoleh produksi perikanan tangkap sebesar 10,057.95 Ton dari target 9,579 Ton. Produksi pada tahun ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 9,056.43 Ton. Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

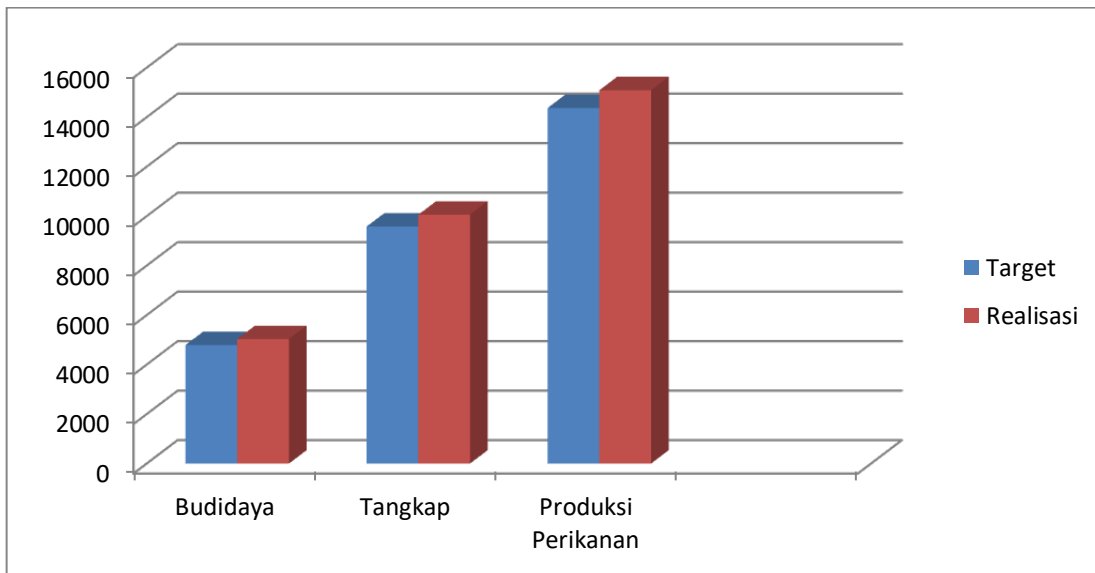
No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	150 orang	Pelaksanaan sosialisasi asuransi nelayan dan Forum KUB
2	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	100 %	Kasus pelanggaran illegal fishing tahun 2019 sebanyak 9 orang
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	15 unit 600 unit	Kapal bermotor 15 unit dan 600 unit tempirai diserahkan kepada 9 KUB
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	55 unit	55 unit perahu motor, tempirai dan GPS diserahkan kepada 4 KUB

Kegiatan Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap yang dilakukan diantaranya berupa patroli/razia rutin setiap bulan. Pada tahun 2019 ditemukan 9 kasus pelanggaran illegal fishing yang diproses secara hukum, yakni 1 (satu) kasus pelanggaran di Desa Samuda, 2 (dua) kasus di Desa Habirau Tengah, 1 (satu) kasus di Desa Paharangan, 4 (empat) kasus di Desa bangkau dan 1 (satu) kasus di Desa Pantai Ulin.

Secara umum produksi perikanan pada tahun 2019 yang sebesar 15.088,5 ton ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 13.629,22 Ton.

Kinerja produksi perikanan tahun 2019 tersaji dalam tabel berikut ini :

Grafik 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program



Tabel 3.9. Data Produksi Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun (Ton)						Realisasi Tahun (Ton)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan budidaya	2.974	3.272	3.800	3.959	4.355	4.791	3.592,33	3.914,01	4.090,4	4.106,20	4.572,79	5.030,55
2	Produksi perikanan tangkap	7.737	7.969	8.208	8.454	8.708	9.579	7.298,8	7.964,64	8.225,4	8.490,04	9.056,43	10.057,95
	Jumlah	10.711	11.241	12.008	12.413	13.063	14.370	10.891.13	11.878,65	12,315.8	12.596,24	13.629,22	15.088,5

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan realisasi produksi perikanan pada tahun 2019 sebesar 110,19% dibandingkan produksi tahun 2018 (108,20%), produksi perikanan pada tahun 2017 (102,28%) dan tahun 2016 (103,68%). Hal ini disebabkan adanya pemberian bantuan dari pemerintah baik yang bersumber dari dana Kabupaten maupun Pusat (DAK) kepada nelayan/Pokmaswas/ pembudidaya ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. DAK pada tahun 2016 hanya untuk Balai Benih Ikan sementara pada tahun 2017 tidak ada dana DAK. Tahun 2018 mendapat dana DAK yang diserahkan kepada 6 KUB dari 64 jumlah KUB se Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bantuan dari swasta/CSR dari Antang Gunung Meratus berupa kolam bioflok di Desa batang Kulur Sungai Raya dan



bantuan dari APBN melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin berupa kolam bioflok di Pondok Pesantren Atthailah Kapuh Simpur. Sementara dana DAK tahun 2019 terdiri dari :

Tabel 3.10. Daftar Penerima Barang Hibah Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Hibah
1	KUB Banjarbaru Sejahtera	Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan	14 unit
2	KUB Bangun Sejahtera	Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan	14 unit
3	KUB Amanah	Desa Bajayau Lama Kec. Daha Barat.	14 unit
4	KUB Pulau Negara	Keluurahan Jambu Hilir Kec. Kandangan	13 unit
<b>Jumlah</b>		<b>55 unit terdiri dari Kapal Perikanan (Perahu Motor), Alat Tangkap ikan (Tempirai) dan alat bantu (GPS)</b>	

Tabel 3.11. Daftar Penerima Barang Hibah Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah	
			Benih (ekor)	Pakan (Kg)
1	Batuah	Desa Mawangi Kec. Padang Batung	5.000 ekor	1.190 kg
2	Pesantren Ghanna Annabawiyah	Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan	5.000 ekor	1.190 kg
<b>Jumlah</b>		Benih ikan Gurame 10.000 ekor Pakan 2.380 Kg, Serok 4 Buah Hapa 2 buah, Waring 100 Meter Cangkul 2 Buah, Baskom 6 Buah		

Adapun data produksi perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Data Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Produksi Penangkapan Tahun (Ton)					Produksi Budidaya (Ton)				
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
192.530	241.296	247.735	253.898,1	256.488,12	97.733	129.371,3	160.174,5	164.715,1	178.277,36

Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Sementara data produksi perikanan nasional sebagai berikut :



Tabel 3.13. Data Produksi Perikanan Nasional

Capaian	Tahun (juta ton)			
	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan tangkap	6,48	6,52	6,83	6,04
Produksi perikanan budidaya	14,36	15,63	16,68	17,22

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki produksi perikanan tangkap yang lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan budidaya dibandingkan produksi nasional yang lebih banyak produksi budidayanya. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam Kalimantan Selatan dan khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki sungai besar dan danau seluas 2.059 Ha (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023)





Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	TARGET TRIWULAN				REALISASI TARGET TRIWULAN				CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
						TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	-	-	-	5,46	-			8,42	0	44,451,600	44,247,000	99.54
		<b>Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	%	3	-	3	-	-	0	3	-	-	100	27.900.000	27.900.000	100
		1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menggunakan teknologi hasil perikanan	orang	9	-	9	-	-	-	9	-	-	100	8.250.000	8.250.000	100
		2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan	kali	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100	7.750.000	7.750.000	100
		3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pemasaran hasil perikanan yang tersedia	unit	2	-	-	2	-	-	-	2		100	11.900.000	11.900.000	100
		<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan</b>	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	1	-	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5		100	16.551.600	16.347.000	98.76
		1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang memiliki kompetensi	orang	70	-	35	35	-	-	35	35		100	16.551.600	16.347.000	98.76

Pada Tabel 3.14 diatas, Pencapaian Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Perikanan merupakan Bidang yang melakukan kegiatan urusan Plihan Bidang Kelautan dan Perikanan penunjang dalam mencapai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi pada tahun 2019 pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif sebanyak 3 % dan peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan sebanyak 1% sudah tercapai dari kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
	<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	3%	
1	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	9 orang	
2	Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	1 kali	
3	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	2 unit	
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan</b>	1 %	
1	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	70 orang	

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan berupa pemberian hibah kepda UP2K Sehati Desa Muning Baru dan Kelompok Usaha Bersama berupa 1 buah peti pendingin dan 1 buah sealer dengan target dapat dimanfaatkan oleh masing-masing anggota kelompok sebanyak 9 orang. Kegiatan Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan berupa pemberian hibah peralatan Pengembangan Ikan Hias (kelompok IGPA Kec.Kandangan) sementara kegiatan Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan pelaku agribisnis perikanan berupa Pelatihan Teknis Pengolahan Produk Perikanan beserta Desain Kemasannya serta Temu UKM.

#### **3.4. Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 3.15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perikanan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:			
	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor,	39.680.350	38.652.350	97,41
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.820.000	26.239.753	79,95
	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000	14.000.000	100,00
	4. Penyediaan makanan dan minuman	24.975.000	22.175.000	88,79
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran,	156.750.000	128.500.000	81,98
6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan Lapangan	310.607.650	263.337.670	84,78	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.320.745	86.868.990	99,48
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	93.656.000	65.787.280	70,24
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	103.400.000	96.426.000	93,26
	3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			
3.	Program peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	1. Penyusunan dokumen keuangan	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah			
	1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100,00	81.197.600	92,18
5	Program peningkatan produksi perikanan budidaya			
	1. Pengembangan bibit kan unggul	103.150.000	101.142.500	98,05
	2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000	173.823.000	97,49
	3. Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000	313.175.000	93,43
	4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000	14.595.000	99,79
	5. Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000	24.161.250	93,43
6. Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	118.650.000	115.300.000	97,18	
6.	Program peningkatan produksi perikanan tangkap			
	1. Pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap	19.854.500	18.654.000	93,95
	2. Pengawasan dan kelestarian perikanan tangkap	371.690.000	360.319.500	96,94
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana nelayan perikanan tangkap (DAK)	986.975.000	920.162.500	93,23
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana nelayan perikanan tangkap	253.850.000	238.670.000	94,02	
7.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
	2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00
	3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan 1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	16.551.600,00	16.347.000,00	98,76
<b>JUMLAH</b>		<b>3.413.644.445,00</b>	<b>3.185.084.393,00</b>	<b>93,3</b>

Nilai realisasi anggaran ini 3,185,084,393 atau 93,3 % lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 95,7 %. Hal ini menunjukkan lebih sedikit penggunaan uang daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100%.

Sementara pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 72.850.000 dari target Rp. 70.000.000 atau sebesar 104,07% yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang pendapatannya sebesar Rp. 61.150.000 dari target Rp. 60.000.000 atau sebesar 101,92 %. Pendapatan ini berasal dari penjualan bibit ikan di Balai Benih Ikan (BBI). Produksi benih di BBI tahun 2019 sebesar 652.7000 ekor dari target sebesar 650.000 ekor.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada tahun 2019 belum semua indikator kinerja dapat direalisasikan. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja sasaran adalah :

1. Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai/predikat AKIP belum ada. Belum dilakukan evaluasi untuk Tahun 2019. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 sebesar 20,67 dan nilai evaluasi AKIP Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 80,55 atau kategori A.
2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan tahun 2019 sebesar 8,42% atau 154.21 % dari target 5,46 %. Data perhitungan persentase pertumbuhan PDRB diperoleh dari BPS yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 sebesar 7,13 %. Pertumbuhan PDRB ini ditopang oleh produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan pada tahun 2019 sebesar 15.088,50 Ton dari target 14.370 Ton (105%) yang terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 5.030,55 Ton dari target 4.791 Ton (105%) dan produksi perikanan tangkap sebesar 10.057,95 Ton dari target 9.579 Ton (105%).
3. Untuk realisasi keuangan tahun 2019 sebesar Rp. 3.185.084.393 dari 3.413.644.445 atau 93,3 % lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2018 yang capaian realisasinya sebesar 95,7%.

## DOKUMENTASI KEGIATAN

## 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya







2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap







3. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

